

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS

I Made Widi Adnyana¹

A.A. Gede Krisna Murti²

I Dewa Ayu Kristiantari³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa^{1,2,3}
imadewidiadnyanapeach7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan sampel yang digunakan adalah 162 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji F dan Uji t. berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Saran yang dapat diberikan adalah instansi pemerintah perlu terus meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan untuk memastikan sasaran anggaran jelas, realistik, dan dapat dicapai. Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kinerja Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Dalam upaya mengukur dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perpendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati/Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan

pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada organisasi pemerintahan, anggaran berperan untuk mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan strategi yang ditetapkan dan untuk mengendalikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Hal ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat.

Partisipasi individual dari pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Instansi Pemerintah yang tidak luput dari sorotan publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan evaluasi untuk dijadikan ukuran perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan atau mengelola anggaran daerah agar lebih efektif. Pengukuran tersebut didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik begitu pun sebaliknya.

Menurut Syahputra (2018) anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai akuntabilitas pemerintah.

Dalam berbagai berita, tingkat akuntabilitas Sebagian besar pemerintah daerah masih diragukan, serta dilihat dari kasus yang ditemukan yaitu kasus penyuapan yang dilakukan oleh Eka Wiryastuti selaku mantan Bupati Tabanan. Dikutip dari CNN Indonesia edisi 14 Juni 2022, mantan Bupati Tabanan telah terbukti melakukan penyuapan kepada mantan Pegawai Kementerian Keuangan hal ini dilakukan untuk mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tabanan dapat memperoleh nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan untuk mendapatkan jumlah Dana Insentif Daerah (DID) yang lebih besar. Penerapan SAKIP yang efektif menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mewujudkan *good governance* berjalan dengan baik.

Good governance ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, transparansi atas penyerapan anggaran dan laporan program serta kegiatan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Murdi, dkk 2020). Selain itu juga dari hasil-hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga dirasa masih perlu dilakukannya penelitian kembali. Maka faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui tentang akuntabilitas adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Latar belakang dipilihnya kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel dependen dalam penelitian ini karena, dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai. Anggaran yang tidak jelas sasarnya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal (Aprilianti, dkk, 2020). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah pegawai untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Mulyadi, dkk 2018). Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Selain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi juga diperlukan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu (Hidayat, dkk, 2021). Pengendalian akuntansi adalah proses yang dibuat untuk memberika keyakinan yang andal mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, kegiatan pengendalian membantuk memastikan bahwa arah pimpinan instansi dilaksanakan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirdayanti dan Pancawardani (2020) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Dalam pertanggung jawaban suatu anggaran perlu laporan dan sistem pelaporan yang baik, hal ini diperlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan (Mulyadi, dkk 2018). Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan sistem

pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Widyawati (2020), Budiani dan Asyik (2020), Mutimah (2020), dan Naibaho (2021) mengenai pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Budiani dan Asyik, 2020). Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafzan (2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Oleh karena itu, rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan (Fuad, dkk 2020). Anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran anggaran tersebut (Sriwangi, 2018).

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif (Widayanti dan Pancawardani, 2020). Hafzan (2021) menyatakan pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Sistem Pelaporan

Sistem merupakan perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas (KBBI, 2023). Menurut Budiani dan Asyik (2020) sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggung jawaban dari bawah (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Dalam sektor publik, laporan keuangan memiliki andil penting dalam menghasilkan

akuntabilitas. Informasi keuangan yang ada di laporan keuangan menjadi landasan dalam mempertimbangkan keputusan (Azizah dan Widyawati, 2020).

Kinerja Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu konsep dalam pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan tindakan seorang individu atau organisasi yang telah diperintahkan (Mulya, 2022). Akuntabilitas suatu pilar *good government* yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, maka sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan (Nababan, 2021). Rusdiana, dkk (2018) akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang beralamat di Jl. Pahlawan, Delod Peken, Kec. Tabanan, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang berjumlah 162 orang. Dalam pengambilan data untuk penelitian menggunakan sampling jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 162 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jawaban dari pernyataan-pernyataan kuesioner yang diangkakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey* dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis regresi linier berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas yang diteliti yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka mengindikasikan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan juga variabel bebas yang memiliki nilai *VIF* kurang dari 10. Maka dari pada itu model regresi bebas dari gejala multikoleniaritas.

Hasil uji heteroskedastisitas menghasilkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan maka dari itu, penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Adapun hasil analisis regresi dengan program *Statistical Pacage of Social Science (SPSS) for Windows* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	7,394	1,163		6,358	0,000
	Kejelasan sasaran anggaran (X1)	0,075	0,035	0,150	2,159	0,032
	Pengendalian akuntansi (X2)	0,378	0,058	0,444	6,476	0,000
	Sistem pelaporan (X3)	0,103	0,031	0,237	3,309	0,001
a. Dependent Variable: y						

Sumber: Data diolah (2024)

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Y = 7,394 + 0,150X_1 + 0,444X_2 + 0,237X_3$$

$\alpha = 7,394$ menunjukkan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan sama dengan nol maka akuntabilitas kinerja akan sebesar konstanta 7,394.

$\beta_1 =$ Apabila kejelasan sasaran anggaran dianggap tetap maka dengan tambahan satu satuan akuntabilitas kinerja meningkat sebesar 0,150

$\beta_2 =$ Apabila pengendalian akuntansi dianggap tetap dengan tambahan satu satuan kejelasan sasaran anggaran menyebabkan akuntabilitas kinerja juga meningkat sebesar 0,444.

$\beta_3 =$ Apabila sistem pelaporan dianggap tetap dengan tambahan satu satuan kejelasan sasaran anggaran menyebabkan akuntabilitas kinerja juga meningkat sebesar 0,237.

Pembahasan

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Hasil analisis penelitian pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan, begitu juga sebaliknya semakin buruk kejelasan sasaran anggaran maka akan menurunkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. Sejalan dengan teori keagenan (agency theory), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Bayan, 2020). Dalam hal ini kaitannya dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan akan mampu memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan menjadi tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga (2018) dan Syahputra (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Hasil analisis penelitian pengaruh pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan, begitu juga sebaliknya semakin rendah pengendalian akuntansi maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. *Agency Theory* berkaitan erat dengan pengendalian akuntansi karena teori ini membahas hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dalam sebuah organisasi, serta bagaimana potensi konflik kepentingan di antara mereka dapat dikelola melalui mekanisme pengendalian. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama, dkk, Wirdayanti dan Pancawardani (2020), Azizah dan Widyawati (2020), Budiani dan Asyik (2020), dan Hafzhan (2021) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Hasil analisis penelitian pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan, menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sistem pelaporan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan, begitu juga sebaliknya semakin rendah

sistem pelaporan maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan. *Agency Theory* menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) dalam organisasi, termasuk instansi pemerintah. Dalam konteks ini, sistem pelaporan berperan penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui pelaporan yang transparan dan akurat, pengelola (agen) diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pemilik (publik atau atasan). Sistem pelaporan yang baik mengurangi asimetri informasi, memungkinkan monitoring yang efektif, dan membantu memastikan bahwa kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azizah dan Widyawati (2020), Budiani dan Asyik (2020), dan Mutimah (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tabanan.

Saran

1. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran pernyataan yaitu “Sasaran anggaran satuan kerja saya harus diuraikan secara jelas” memiliki nilai rata - rata terendah, maka disarankan bagi pihak instansi menjelaskan sasaran anggaran satuan kerja dengan jelas.
2. Pada variabel pengendalian akuntansi pernyataan yaitu “Setiap transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.” memiliki nilai rata - rata terendah, maka disarankan bagi pihak instansi meningkatkan kinerja pegawai agar tidak lupa pada saat mencatat setiap transaksi pada buku catatan akuntansi.
3. Pada variabel sistem pelaporan pernyataan yaitu “Instansi selalu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.” memiliki nilai rata - rata terendah, maka disarankan bagi pihak instansi untuk sering memberikan informasi keuangan yang terbuka agar masyarakat tidak

berfikiran negatif.

4. Pada variabel akuntabilitas kinerja pernyataan yaitu “Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan.” memiliki nilai rata - rata terendah, maka disarankan bagi pihak instansi untuk lebih menekankan agar pimpinan dan peawai selalu terlibat Bersama-sama dalam mengevaluasi kegiatan.
5. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lainnya seperti gaji, gaya kepemimpinan, selain itu diperlukan memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas di Instansi pemerintah Kabupaten Tabanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150-159.
- Azizah, A. N., & Widyawati, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Fahrudin, M., Halim, A., & Hamid, M. (2017). Analisis Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo (*Doctoral dissertation*, STIE Widya Wiwaha).
- Hafzhan, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021, July). Pengaruh Good Governance, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 1, pp. 87-97).
- Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap

- akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192-199.
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192-212.
- Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 95-101.
- Mutimah, M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah) (*Doctoral dissertation*, Universitas Satya Negara Indonesia).
- Nababan, N., & Sembiring, M. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Pada Desa Cengkering Pekan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara (*Doctoral dissertation*, UMSU).
- Naibaho, M. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Batam (*Doctoral dissertation*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429-444.
- Ritonga, F. H. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Kantor Wali Kota Medan (*Doctoral dissertation*).
- Syahputra, D. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap akuntabilitas kinerja Pada Kantor Wali Kota Medan (*Doctoral dissertation*).
- Zatira, S. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem pelaporan Terhadap akuntabilitas kinerja Pada Pemerintah Kota Medan. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).